

Tingkat kemiskinan dan keterbatasan pada sumber daya akibat urbanisasi di DKI Jakarta

Kania Putri Riandani¹, Muhammad Faras Adila¹, Muhammad Zid¹,
Hikari Dwi Saputr¹, Muhammad Yusuf¹

¹ Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka Raya, RT. 11/RW. 14, Rawamangun, Kec Pulo Gadung,
Jakarta Timur, 13220, Indonesia
kania2548@gmail.com

Abstrak

Urbanisasi di DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan dinamika sosial ekonomi yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara urbanisasi, arus migrasi, dan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi literatur melalui penelusuran dan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya Profil Migran Susenas 2024, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya arus migrasi masuk, terutama migran seumur hidup, meningkatkan kepadatan penduduk dan menimbulkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya perkotaan seperti perumahan layak, air bersih, dan lapangan kerja formal. Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi berkontribusi terhadap kemiskinan perkotaan yang pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,14 persen. Temuan ini sejalan dengan teori modernisasi Alex Inkeles dan teori push-pull Everett S. Lee, yang menjelaskan bahwa urbanisasi tanpa pengelolaan yang inklusif berpotensi memperlebar ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan perkotaan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk menekan dampak negatif urbanisasi terhadap kemiskinan di DKI Jakarta.

Kata Kunci: Urbanisasi, Kemiskinan perkotaan, Keterbatasan pada sumber daya

Abstract

Urbanization in DKI Jakarta in 2024 reflects complex socio-economic dynamics that significantly affect urban poverty and resource limitations. This study aims to examine the relationship between urbanization, migration flows, and poverty levels in DKI Jakarta. The research employs a literature review method by analyzing secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS), particularly the 2024 Susenas Migrant Profile, as well as relevant national and international scientific journals published within the last ten years. The findings indicate that the high inflow of migrants, especially lifetime migrants, has increased population density and intensified pressure on urban resources, including adequate housing, clean water, and formal employment opportunities. Inequality in access to resources and economic opportunities has contributed to urban poverty, which reached 4.14 percent in 2024. These findings are consistent with Alex Inkeles' modernization theory and Everett S. Lee's push-pull theory, which suggest that urbanization without inclusive governance and equitable resource management tends to exacerbate social inequality. Therefore, inclusive and sustainable urban development policies are essential to mitigate the negative impacts of urbanization on poverty in DKI Jakarta.

Keywords: Urbanization, Urban Poverty, Resource Limitation

1. PENDAHULUAN

Urbanisasi merupakan fenomena demografis dan sosial yang telah menjadi faktor dominan dalam perubahan struktur masyarakat di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Urbanisasi mencerminkan perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan yang lebih maju secara ekonomi, sosial, dan teknologi (Hadijah & Sadali, 2020). Namun, walaupun urbanisasi sering dihubungkan dengan kesempatan ekonomi dan modernisasi, realitasnya menunjukkan bahwa fenomena ini juga membawa berbagai tantangan besar, terutama dalam konteks urbanisasi cepat, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya di kota-kota besar. Salah satu isu utama yang muncul adalah bahwa urbanisasi yang cepat sering kali melebihi kapasitas kota dalam menyediakan layanan dasar, kesempatan kerja yang layak, dan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung kehidupan penduduk baru yang terus bertambah.

Urbanisasi di Indonesia, misalnya, telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi perkotaan secara keseluruhan, tetapi juga mengubah pola kemiskinan, dari kemiskinan pedesaan menjadi kemiskinan urban yang persisten (Hadijah & Sadali, 2020). Studi ini menemukan bahwa setiap peningkatan 1% dalam urbanisasi hanya mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4%, namun pada saat yang sama mengakibatkan peningkatan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan. Urbanisasi tidak selalu langsung mengurangi kemiskinan secara signifikan, tetapi cenderung memodifikasi bentuk kemiskinan yang ada (Hadijah & Sadali, 2020)

Permasalahan kemiskinan urban ini bukan hal yang eksklusif di Indonesia. Secara global, fenomena "*urban poverty*" menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi kota yang cepat sering kali menghasilkan permukiman tak layak, keterbatasan akses layanan dasar, dan persaingan sumber daya yang ketat, terutama di kawasan informal atau permukiman kumuh yang berkembang di pinggiran kota (Saputri et al., 2024). Diungkapkan bahwa urbanisasi yang cepat sering disertai dengan perencanaan yang buruk dan implementasi kebijakan yang lemah, sehingga menyebabkan keterbatasan infrastruktur layanan publik seperti air bersih, sanitasi, perumahan layak, serta lahan yang layak huni yang dapat diakses oleh kelompok berpendapatan rendah (Lenhardt, 2024).

Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu konsekuensi paling nyata dari urbanisasi yang tidak terkelola secara efektif. Ketika populasi kota meningkat tajam, kota-kota menghadapi tekanan luar biasa pada ketersediaan sumber daya seperti lahan, air, energi, fasilitas kesehatan, dan kesempatan kerja. Kekurangan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar seringkali memperburuk situasi bagi kelompok miskin urban, yang bahkan menghadapi ketidakamanan pangan, sanitasi yang buruk, dan risiko kesehatan yang lebih tinggi (Joyce, 2024). Dalam publikasi *Save The Children* yang disusun oleh Allison Joyce menunjukkan bahwa urbanisasi sering meninggalkan kelompok miskin urban dengan layanan sosial yang tidak mencukupi dan sistem perlindungan sosial yang lemah, terutama bagi anak-anak dan keluarga berpendapatan rendah.

Urbanisasi di wilayah perkotaan Indonesia telah memberikan tekanan signifikan terhadap sektor perumahan dan pola permukiman kota. Peningkatan arus migrasi dari desa ke kota menyebabkan lonjakan jumlah penduduk perkotaan yang tidak sebanding dengan kapasitas penyediaan hunian, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta (Arifin et al., 2024). Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan perumahan tersebut berdampak langsung pada meningkatnya harga tanah dan biaya sewa hunian di kawasan perkotaan (Perdamaian & Zhai, 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa laju urbanisasi yang cepat belum diiringi oleh kebijakan perumahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan di perkotaan. Keterbatasan penyediaan hunian layak mencerminkan adanya kesenjangan antara dinamika pertumbuhan kota dan kemampuan sistem perkotaan dalam mengelola sumber daya secara adil (Arifin et al., 2024). Dengan demikian, urbanisasi di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan demografis, tetapi juga memunculkan tantangan struktural terkait ketimpangan akses terhadap sumber daya perkotaan, khususnya dalam sektor perumahan (Perdamaian & Zhai, 2024). Dalam hal faktor sosial lainnya, urbanisasi yang cepat juga dihubungkan dengan peningkatan ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketika sumber daya seperti peluang kerja formal dan layanan sosial tidak tersebar merata, kelompok berpendapatan rendah cenderung mengalami hambatan dalam mobilitas sosial mereka, memperkuat kemiskinan urban sebagai masalah struktural dan multidimensional (Kaiser et al., 2024).

Dalam kajian global, urbanisasi tidak lagi dipahami hanya sebagai pergeseran penduduk dari wilayah pedesaan ke perkotaan, melainkan sebagai proses pembangunan yang membawa implikasi kebijakan yang multidimensional. Sejumlah kajian internasional menegaskan bahwa pengaruh urbanisasi terhadap kemiskinan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah dalam mengelola pertumbuhan kota serta menyediakan layanan publik yang inklusif. Urbanisasi dapat menjadi sarana peningkatan kesejahteraan apabila didukung oleh perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, kebijakan perumahan yang terjangkau, dan sistem perlindungan sosial yang adaptif (UN Habitat, 2020). Sebaliknya, lemahnya tata kelola perkotaan dan keterbatasan koordinasi kebijakan berpotensi memperbesar ketimpangan sosial serta memperluas kemiskinan di kawasan perkotaan (Alfani et al., 2025).

Urbanisasi merupakan fenomena ganda, di satu sisi membuka peluang ekonomi dan modernisasi, tetapi di sisi lain dapat memperburuk kemiskinan dan menimbulkan keterbatasan sumber daya bila tidak diimbangi oleh perencanaan tata kota yang baik, penyediaan infrastruktur yang merata, dan kebijakan sosial yang inklusif. Tantangan utama dalam mengatasi kemiskinan urban dalam konteks urbanisasi terletak pada kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyediakan sumber daya yang adil dan memastikan akses yang memadai terhadap layanan dasar serta kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat perkotaan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah proses pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari berbagai sumber bacaan termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian untuk memahami perkembangan topik tertentu (Pratiwi et al., 2025). Pendekatan tersebut dipilih karena mampu menghadirkan pemahaman menyeluruh mengenai hubungan antara urbanisasi, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya melalui telaah berbagai sumber ilmiah yang relevan.

Studi literatur dilaksanakan melalui beberapa tahapan, diawali dengan penetapan fokus kajian pada isu urbanisasi, kemiskinan perkotaan dan keterbatasan sumber daya di wilayah perkotaan, khususnya DKI Jakarta. Selanjutnya, penelusuran dilakukan terhadap jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan lembaga resmi, serta publikasi statistik pemerintah. Sumber-sumber yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi topik, tahun publikasi, dan kredibilitas sumber, sebelum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola dan implikasi urbanisasi terhadap kondisi sosial ekonomi perkotaan.

Sumber data utama penelitian ini berasal dari data sekunder resmi Badan Pusat Statistik (BPS), terutama Profil Migran Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2024, yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik migrasi dan kondisi sosial ekonomi penduduk perkotaan di DKI Jakarta. Data tersebut dipilih karena memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi serta menjadi rujukan utama dalam kajian kependudukan di Indonesia.

Sebagai pendukung, penelitian ini memanfaatkan sumber-sumber ilmiah nasional dan internasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang membahas urbanisasi, kemiskinan perkotaan, perumahan, dan keterbatasan sumber daya di wilayah urban. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menginterpretasikan data statistik dan temuan literatur, kemudian mengaitkannya dengan teori migrasi *push-pull* dan teori modernisasi, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika dan dampak urbanisasi di DKI Jakarta.

Proses analisis dilaksanakan secara deskriptif dengan mengolah dan mengkaji kembali data BPS guna menggambarkan kondisi nyata urbanisasi dan kemiskinan di Jakarta. Data tersebut kemudian dikontekstualisasikan dengan teori dan temuan dalam literatur, seperti teori modernisasi dari Alex Inkeles (1974) serta teori push-pull yang dikembangkan Everett S. Lee (1966), untuk menjelaskan pendorong migrasi beserta dampaknya terhadap struktur sosial ekonomi perkotaan. Penafsiran dilakukan secara sistematis dengan menelusuri pola, keterhubungan, dan konteks yang muncul dari berbagai sumber.

Setelah seluruh data dan literatur ditelaah, peneliti merumuskan kesimpulan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana urbanisasi pada tahun 2024 berperan dalam meningkatkan tekanan terhadap sumber daya serta memperbesar kerentanan ekonomi di Jakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Berdasarkan laporan Profil Migran hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), DKI Jakarta tetap menunjukkan karakteristik sebagai tujuan utama migrasi antardaerah di Indonesia. Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, komposisi penduduk Jakarta masih didominasi oleh penduduk nonmigran dengan persentase sebesar 69,7 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk Jakarta merupakan penduduk menetap yang telah lama tinggal serta memiliki tingkat adaptasi yang relatif baik terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan.

Di sisi lain, proporsi penduduk migran mencapai 30,3 persen, yang mencerminkan kuatnya daya tarik Jakarta bagi penduduk dari wilayah lain. Kelompok migran tersebut didominasi oleh migran masuk seumur hidup, yakni penduduk yang lahir di luar DKI Jakarta dan kemudian menetap secara permanen di wilayah ini. Tingginya persentase migran seumur hidup menunjukkan bahwa migrasi ke Jakarta umumnya merupakan keputusan jangka panjang, yang didorong oleh pertimbangan ekonomi dan harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.

Sementara itu, migran masuk risan penduduk yang berpindah ke Jakarta dalam lima tahun terakhir tercatat memiliki proporsi yang relatif kecil, yaitu sebesar 1,4 persen. Meskipun jumlahnya terbatas, keberadaan kelompok ini menandakan bahwa arus migrasi baru ke Jakarta masih terus berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa Jakarta tetap dipandang sebagai

pusat peluang ekonomi, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan perkotaan seperti kepadatan penduduk, keterbatasan hunian layak, serta tingginya biaya hidup.

Secara keseluruhan, temuan ini menggambarkan dinamika migrasi di DKI Jakarta yang bersifat kompleks, dengan dominasi migrasi permanen dibandingkan migrasi jangka pendek. Kondisi tersebut berimplikasi terhadap laju pertumbuhan penduduk serta meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur perkotaan, sekaligus menimbulkan tekanan pada sektor ekonomi dan sosial di wilayah Jakarta.

Tabel 1. Presentase penduduk DKI Jakarta 2024

Kategori Penduduk (Antarprovinsi)	Presentase
Migran	30,3%
Nonmigran	69,7%
Migran masuk seumur hidup	30,3%
Migran masuk risen	1,4%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

Berdasarkan Tabel 2, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,14 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 449,07 ribu jiwa. Meskipun secara persentase angka kemiskinan Jakarta tergolong lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, besarnya jumlah penduduk miskin secara absolut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di wilayah perkotaan tetap menjadi isu yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan paradoks perkotaan, di mana pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi aktivitas ekonomi tidak selalu diiringi dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.

Garis kemiskinan per kapita di DKI Jakarta yang mencapai Rp255.381 per orang per bulan mengindikasikan tingginya biaya hidup di wilayah perkotaan. Tingginya garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa penduduk Jakarta memerlukan pengeluaran yang relatif besar hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga pangan, biaya transportasi, maupun fluktuasi pendapatan, terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Fenomena kemiskinan di Jakarta tidak dapat dilepaskan dari dinamika urbanisasi dan migrasi penduduk. Arus migrasi masuk, khususnya migran seumur hidup, berkontribusi terhadap meningkatnya tekanan pada pasar tenaga kerja perkotaan. Banyak pendatang yang tidak sepenuhnya terserap ke dalam sektor formal, sehingga terpaksa bekerja di sektor informal dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil dan minim perlindungan sosial. Kondisi ini berpotensi memperluas kelompok penduduk rentan miskin di wilayah perkotaan, meskipun secara statistik mereka belum seluruhnya tercatat sebagai penduduk miskin.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap hunian layak juga menjadi faktor yang memperkuat kerentanan kemiskinan di Jakarta. Tingginya harga lahan dan biaya sewa mendorong sebagian masyarakat miskin dan migran berpenghasilan rendah untuk tinggal di kawasan padat penduduk dengan kualitas lingkungan yang rendah. Lingkungan hunian yang tidak memadai berimplikasi pada keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti sanitasi, air bersih, dan kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kesejahteraan rumah tangga miskin.

Data kemiskinan DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di wilayah perkotaan bersifat struktural dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga erat kaitannya dengan dinamika migrasi, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja layak, serta tingginya biaya hidup perkotaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan di Jakarta perlu dilakukan secara komprehensif melalui kebijakan yang terintegrasi, mencakup penciptaan lapangan kerja formal, peningkatan keterampilan tenaga kerja migran, serta penyediaan hunian dan layanan publik yang terjangkau bagi kelompok berpendapatan rendah.

Tabel 2. Data Kemiskinan DKI Jakarta (2024)

Indikator	Angka
Tingkat kemiskinan	4,14%
Jumlah penduduk miskin	449,07
Garis kemiskinan per kapita	Rp 255.381/kapita/bulan (30,18%).

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 2024

3.2. PEMBAHASAN

Bagian ini membahas secara mendalam hubungan antara urbanisasi, migrasi, dan kemiskinan perkotaan di Jakarta dengan mengintegrasikan temuan empiris, data statistik, dan pendekatan teoretis yang relevan. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana proses urbanisasi, yang didorong oleh aliran migrasi dan ketidaksetaraan pembangunan, berkontribusi pada munculnya dan persistennya kemiskinan di kawasan perkotaan, khususnya di DKI Jakarta. Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk yang melibatkan perubahan tempat tinggal melintasi batas administratif (Tsegay, 2023), migrasi adalah kekuatan pendorong demografi dan sosial yang sentral (Sprung, 2025).

Migrasi risen adalah bentuk migrasi yang tercatat berdasarkan perbedaan tempat tinggal dalam rentang waktu lima tahun terakhir (Noviandita & Prastowo, 2021). Sedangkan migrasi seumur hidup didefinisikan berdasarkan perbedaan antara tempat lahir seseorang dengan tempat tinggalnya saat ini (Wulandari, 2022).

Urbanisasi ke Jakarta merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Urbanisasi adalah proses konsentrasi populasi terutama ke area perkotaan yang ditandai oleh pertumbuhan jumlah penduduk kota dan peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di area urban (Biłozor & Cieślak, 2021). Berdasarkan kajian literatur, fenomena ini dapat dipahami melalui pendekatan sosiologi pembangunan dan teori perubahan sosial, seperti yang dikemukakan oleh Alex Inkeles (1969) yang menekankan bahwa proses modernisasi dan urbanisasi membawa perubahan dalam nilai, pola perilaku, dan struktur sosial masyarakat. Namun, ketika perubahan sosial ini tidak diimbangi dengan pemerataan sumber daya dan kesempatan ekonomi, maka akan muncul masalah sosial baru seperti kemiskinan urban.

Thomas Malthus menyebutkan ada 3 faktor penyebab terjadinya perubahan pertumbuhan penduduk, yakni *fertilitas* (kelahiran), *mortalitas* (kematian) dan *migrasi* (mobilitas penduduk) (Saputro, 2020). Kemiskinan diartikan sebagai standar tingkat hidup yang rendah, yakni terdapat kekurangan materi pada sejumlah orang/golongan jika dibandingkan dengan standar kehidupan masyarakat pada umumnya yang dipakai pada masyarakat tersebut (Saputro, 2020).

Fenomena ini sejalan dengan teori *push and pull* dari (Everett S. Lee (1966)), di mana faktor “*push*” berupa kemiskinan dan kurangnya peluang di desa mendorong orang berpindah, sementara faktor “*pull*” berupa harapan pekerjaan dan kehidupan lebih layak di kota menarik migran menuju Jakarta. Sulitnya memperoleh pendapatan di daerah asal dan kemungkinan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik di daerah tujuan merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang dalam bermigrasi (Amajida, 2023). Namun, hasil pembahasan menunjukkan bahwa ekspektasi ekonomi tersebut sering kali tidak sepenuhnya terpenuhi akibat keterbatasan daya serap pasar kerja perkotaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan tingkat kemiskinan di DKI Jakarta berada pada angka 4,14%. Angka ini mengisyaratkan bahwa meskipun Jakarta merupakan pusat ekonomi terbesar di Indonesia, kemiskinan tetap menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan, masih ada sebagian warga Jakarta yang hidup di bawah standar kesejahteraan minimum. Pada tahun tersebut, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai sekitar 449,07 ribu orang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Jakarta dikenal sebagai pusat ekonomi terbesar di Indonesia, persoalan kemiskinan tetap menjadi isu penting yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Sementara itu, garis kemiskinan per kapita di Jakarta pada 2024 ditetapkan sebesar Rp 255.381 per bulan. Kemiskinan per kapita merujuk pada kondisi ketika pendapatan atau pengeluaran rata-rata seseorang dalam satu rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan per kapita yang telah diterapkan. Ukuran ini dihitung dengan membagi total pengeluaran rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga, sehingga mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi hidup minimum.

Dalam dimensi perkotaan seperti Jakarta, konsep kemiskinan per kapita sangat krusial karena biaya hidup yang jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Garis kemiskinan per kapita tidak hanya mencakup kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan non-pangan yang esensial, seperti biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih dan energi.

Kemiskinan per kapita di Jakarta juga bersifat rentan (*vulnerable poverty*). Banyak rumah tangga hidup tepat di atas garis kemiskinan, sehingga kenaikan kecil harga kebutuhan pokok, biaya sewa rumah, atau kehilangan pekerjaan sementara dapat langsung mendorong mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal tidak adanya pendapatan, tetapi juga ketidakstabilan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, ukuran per kapita sering kali menyembunyikan ketimpangan internal rumah tangga. Pembagian pendapatan yang tidak merata, misalnya antara kepala keluarga dan anggota keluarga lain dapat menyebabkan sebagian individu mengalami deprivasi meskipun secara statistik rumah tangga tersebut tidak tergolong miskin. Hal ini mempertegas bahwa kemiskinan per kapita perlu dipahami tidak hanya secara angka, tetapi juga secara sosial.

Kemiskinan yang timbul akibat urbanisasi di Jakarta bersifat struktural dan berlapis-lapis. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur publik membatasi peluang mobilitas sosial bagi masyarakat miskin perkotaan. Anak-anak yang tumbuh di permukiman kumuh menghadapi hambatan awal dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga kemiskinan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Situasi ini membuktikan bahwa urbanisasi tanpa kebijakan inklusif tidak hanya menciptakan kemiskinan sementara, tetapi juga memperkuat kemiskinan sebagai bagian dari struktur sosial perkotaan.

Kemiskinan di wilayah perkotaan tidak dapat dipandang semata sebagai akibat dari kurangnya pendapatan, melainkan sebagai hasil dari sistem sosial yang timpang, tidak inklusif, dan tidak mampu mengelola keterbatasan sumber daya secara adil. Oleh karena itu, pendekatan penanganan kemiskinan perlu mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, spasial, dan ekologis agar pembangunan kota dapat berlangsung secara berkelanjutan dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemiskinan perkotaan sangat erat kaitannya dengan keterbatasan terhadap sumber daya, di Jakarta orang berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan yang layak namun ketersediaan lapangan kerja sangat terbatas, minimnya kesempatan kerja dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah tingkat pendidikan yang masih rendah, serta ketiadaan keterampilan khusus yang dapat meningkatkan daya saing individu dalam pasar kerja (Saputro, 2020). Pendatang baru dari desa yang tidak memiliki keterampilan khusus dan pendidikan yang tidak memadai akan sangat sulit untuk bersaing dalam aspek sosial maupun ekonomi akibatnya mereka terpaksa bekerja di sektor informal (pedagang asongan, pemulung, buruh harian lepas) dengan pendapatan yang rendah yang membuat mereka sulit untuk membeli ataupun menyewa rumah yang layak, banyak dari mereka yang memilih untuk membangun rumah di pinggir sungai/kolong jembatan yang membentuk permukiman kumuh (*Slum*), kondisi tersebut sangat rentan bagi kesehatan karena mereka yang tinggal di permukiman kumuh lebih susah untuk mengakses air bersih. Hal tersebut diperparah dengan keterbatasan terhadap akses pendidikan bagi anak-anak mereka. Ketimpangan tersebut semakin memperkuat lingkaran kemiskinan dan menghambat peluang masyarakat miskin di perkotaan untuk meningkatkan kondisi sosial mereka (Ikram, Radian Safira, 2023).

Kesenjangan akses tidak hanya mencerminkan perbedaan geografis, tetapi juga memperkuat ketidakadilan sosial, masyarakat yang tinggal di wilayah dengan infrastruktur minim akan menghadapi hambatan lebih besar dalam mobilitas, kesempatan kerja, dan perolehan manfaat pembangunan (Pandey et al., 2022). Di Jakarta, hal ini tampak pada perbedaan kualitas infrastruktur dan layanan publik antara wilayah pusat dan daerah pinggiran. Masyarakat yang tinggal di kawasan padat dan permukiman informal sering kali menghadapi akses terbatas terhadap transportasi yang memadai, ruang publik yang layak, serta fasilitas kota seperti jaringan drainase atau pengelolaan sampah yang efektif. Sebaliknya, kawasan yang lebih maju mendapat prioritas pembangunan sehingga menikmati layanan yang jauh lebih baik. Ketidakseimbangan ini memperkuat segmentasi sosial dan membuat kelompok rentan semakin terpinggirkan dalam dinamika urbanisasi Jakarta.

Ketimpangan infrastruktur merupakan konsekuensi langsung dari cara kota berkembang. Ketika wilayah perkotaan tumbuh, akses terhadap layanan publik dan fasilitas dasar tidak menyebar secara merata. Sebaliknya, infrastruktur cenderung terkonsentrasi di wilayah yang lebih maju dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pola distribusi yang timpang ini terlihat konsisten di berbagai kota, sehingga ketidakmerataan infrastruktur dapat dianggap sebagai ciri struktural dari urbanisasi itu sendiri (Pandey et al., 2022). Untuk memahami dinamika urbanisasi, perlu melihat bagaimana infrastruktur didistribusikan dan bagaimana keputusan pembangunan memprioritaskan wilayah tertentu. Dengan kata lain, urbanisasi bukan hanya proses pertumbuhan fisik kota, tetapi juga proses diferensiasi yang menghasilkan pemenang dan pecundang dalam akses terhadap layanan dasar (Pandey et al., 2022).

4. KESIMPULAN

Urbanisasi di DKI Jakarta tidak sekadar menggambarkan peningkatan jumlah penduduk, tetapi juga menunjukkan perubahan signifikan dalam dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Analisis terhadap data migrasi dan kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan bahwa urbanisasi tetap menjadi faktor demografis dominan yang membentuk struktur sosial ekonomi kota. Proporsi migran seumur hidup yang mencapai hampir sepertiga populasi, serta keberlanjutan arus migran risen setiap tahun, menegaskan bahwa Jakarta masih berperan sebagai magnet mobilitas penduduk di tingkat nasional. Namun, dinamika ini tidak terlepas dari ketimpangan dalam kemampuan migran untuk berintegrasi ke dalam sistem sosial-ekonomi perkotaan.

Ketidakeimbangan tersebut tercermin pada masih tingginya angka kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Migrasi yang didorong oleh faktor “*push*” berupa kemiskinan dan kurangnya peluang di daerah asal, serta faktor “*pull*” berupa ekspektasi pekerjaan di kota, tidak selalu menghasilkan mobilitas sosial yang positif bagi seluruh migran. Bagi kelompok dengan pendidikan dan keterampilan rendah, urbanisasi justru memperbesar risiko keterpinggiran, ditandai dengan dominasi pekerjaan sektor informal, keterbatasan akses perumahan layak, dan kerentanan terhadap siklus kemiskinan.

Tingkat kemiskinan DKI Jakarta yang tercatat sebesar 4,14 persen dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 449 ribu jiwa mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi perkotaan belum sepenuhnya bersifat inklusif. Tingginya garis kemiskinan mencerminkan mahalnya biaya hidup di perkotaan, sehingga kelompok berpendapatan rendah terutama migran dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Urbanisasi yang didorong oleh harapan peningkatan kesejahteraan tidak selalu berujung pada mobilitas sosial yang positif, melainkan justru dapat memperluas kerentanan ekonomi apabila tidak diimbangi dengan daya serap pasar kerja formal yang memadai.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan di Jakarta bersifat struktural dan tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan akses terhadap sumber daya strategis seperti lapangan kerja layak, perumahan terjangkau, infrastruktur dasar, serta layanan pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan distribusi infrastruktur dan layanan publik antarwilayah memperkuat segmentasi sosial dan spasial, di mana masyarakat miskin perkotaan cenderung terkonsentrasi di kawasan padat dan permukiman informal dengan kualitas lingkungan yang rendah. Kondisi ini tidak hanya memperburuk kualitas hidup, tetapi juga mereproduksi kemiskinan antargenerasi.

Ketimpangan distribusi infrastruktur dan layanan publik di Jakarta menunjukkan bahwa urbanisasi bukan proses yang netral, melainkan suatu mekanisme yang secara struktural memproduksi perbedaan spasial dan sosial. Ketidakmerataan ini memperkuat segmentasi masyarakat perkotaan dan menjadi hambatan utama dalam pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Fenomena urbanisasi di Jakarta tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses pertumbuhan penduduk, melainkan sebagai mekanisme yang turut memproduksi dan memperkuat ketimpangan sosial apabila tidak dikelola secara inklusif. Upaya penanggulangan kemiskinan perkotaan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, meliputi pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja formal, serta penyediaan perumahan dan layanan publik yang terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, F., Aron, D. V., Atamanov, A., Andres Castaneda Aguilar, R., Diaz-Bonilla, C., Devpura, N. P., Dewina, R., Finn, A., Fujs, T., Fernanda Gonzalez, M., Krishnan, N., Kocchar, N., Kumar, N., Lakner, C., Lara Ibarra, G., Lestani, D., Liniado, J., Lønborg, J., Mahler, D. G., ... Wambile, A. (2025). Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP) What's New. *Global Poverty Monitoring Technical Note*, 44.
- Amajida, Y. (2023). *FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI SEUMUR HIDUP DI INDONESIA DISUSUN*. 2(4), 31–41.
- Arifin, P., Muhafidin, D., & Pancasilawan, R. (2024). City growth and its impact on residential problems: A case study in the city of Jakarta. *Journal of Community Service and Empowerment*, 5(2), 272–281. <https://doi.org/10.22219/jcse.v5i2.31075>
- Biłozor, A., & Cieślak, I. (2021). Review of experience in recent studies on the dynamics of land urbanisation. *Land*, 10(11). <https://doi.org/10.3390/land10111117>
- David Horton Smith, P. D. (n.d.). *ALEX INKELES AND BECOMING MODERN: DEMONSTRATING SOCIAL STRUCTURAL INFLUENCES ON OVERALL MODERNITY IN SIX DEVELOPING NATIONS IN THE EARLY 1960S*.
- Habitat, U. (2020). *Unpacking the Value of Sustainable Urbanization*. <https://doi.org/10.18356/c41ab67e-en>
- Hadijah, Z., & Sadali, M. I. (2020). Pengaruh Urbanisasi Terhadap Penurunan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 8(3), 290–306. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.290-306>
- Ikram, Radian Safira, F. (2023). Hubungan Antara Urbanisasi dan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis Dampak Migrasi, Permukiman Kumuh, dan Ketimpangan Perkotaan. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 63–74.
- Joyce, A. (2024). *URBANISATION AND CHILD-SENSITIVE SOCIAL PROTECTION Advocacy note. October*.
- Kaiser, Z. R. M. A., Sakil, A. H., & Akter, F. (2024). Urban Poverty: Causes, Current Trends, Consequences, and Pathways to Sustainable Solutions. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4977189>
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration Everett. *Demography*, 3(1), 47–57. <http://links.jstor.org/sici?sici=0070-3370%281966%293%3A1%3C47%3AATOM%3E2.0.CO%3B2-B>
- Lenhardt, A. (2024). Ending extreme poverty in an increasingly urbanised world. *DEEP Thematic Paper, January*. <https://povertyevidence.org/wp-content/uploads/2024/01/Ending-extreme-poverty-in-an-urbanised-world.pdf>
- Noviandita, A., & Prastowo, P. (2021). Determinan migrasi risen masuk ke Provinsi Jawa Barat periode 2000-2015. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 49–57. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol1.iss1.art5>
- Pandey, B., Brelsford, C., & Seto, K. C. (2022). Infrastructure inequality is a characteristic of urbanization. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(15), 4–11. <https://doi.org/10.1073/pnas.2119890119>
- Perdamaian, L. G., & Zhai, Z. (2024). Status of Livability in Indonesian Affordable Housing.

Architecture, 4(2), 281–302. <https://doi.org/10.3390/architecture4020017>

- Pratiwi, N. A., Kirana, R. C., Riani, V. E., & Lita, T. R. (2025). Penerapan Cobit 5 Pada Analisis Audit Sistem Informasi Perpustakaan. *Warta Dharmawangsa*, 19(1), 203–213. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i1.5851>
- Saputri, N. S., Darmawan, A. B., Toyamah, N., & Fillaili, R. (2024). *Political Economy Analysis of Health Financing Reforms in Times of Crisis: Identifying Windows of Opportunity for Countries in the SEA Region. Indonesia Case Study Report*. 3. www.smeru.or.id.
- Saputro, A. (2020). URBAN CRISIS: Produk Kegagalan Urbanisasi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 173. <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i1.2000>
- Sprung, A. (2025). Migration and ageing: development and potential of a new field of research in adult education and learning. *International Journal of Lifelong Education*, 00(00), 1–16. <https://doi.org/10.1080/02601370.2025.2531892>
- Tsegay, S. M. (2023). International Migration: Definition, Causes and Effects. *Genealogy*, 7(3), 1–10. <https://doi.org/10.3390/genealogy7030061>
- Wulandari, E. (2022). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Provinsi, Dan Tingkat Kesempatan Kerja Terhadap Migrasi*. 1–133. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/39863%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/39863/18313311.pdf?sequence=1>